

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmad, M. F. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Achmadi, C. N. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Adjie, H. (2008). *sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2011). *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, H. (2017). *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Ariesto Hadi Sutopo (2010). *Terampil Mengolah Data Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Habib Adjie. (2017). *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MPN)*, Bandung: Refika Aditama.
- Hadi Setia Tunggal . (2006). *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris*, Harvarindo, Jakarta
- Kie, T. T. (2000). *Serba-serbi Praktek Notaris Buku I*. Jakarta: Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Lumban Tobing, G.H.S. (1983) *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Nusa Tenggara Barat.
- Nurbani, S. H. (2016). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Nurbani, S. H. (2016). *Penerapan Teori Hukum Pada PEnelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo.

- R Subekti, R Tjitro Sudibyo (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Salsa, s. N. (2020). *Hukum Pengawasan Notaris dan Belanda*. Jakarta: Kencana.
- Siagian, S. (2003). *Filsafat ADministrasi, Edisi, Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta.
- Sumardjono, M. S. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Tobing, . G. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta
- Tunggal, H. S. (2008). *Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Jabatan Notaris Dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi &AD, ART dan Kode Etik Notaris*. Jakarta: Harvarindo.

## B. JURNAL, MAKALAH DAN TESIS

- Muhammad Nizar Hidayat, 2015, *Evolusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia Di Kalimantan Utara*, Jurnal Paradigma, Vol-IV/No.01/Agustus/2015, Universitas Mulawarman Samarinda.
- Restu Darma Saputra, 2018 “Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pembinaan Notaris Di Kabupaten Berau”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Sofiya Atalia, 2017, *Pelaksanaan Pemeriksaan Tahunan Terhadap Protokol Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Gabungan Di Kota Tarakan Kalimantan Utara*”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Wahyu Bambang Permadi, 2021 “*Dasar Hukum Pemerintah Dalam Menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar Akibat Pandemi Virus Corona (Covid-19)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Palembang

Jurnal Borneo Administrator/Volume 11/No. 3/2015

Jurnal Borneo Administrator/Volume 11/No. 3/2015

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur 2019, Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2018.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39- PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan tata Kerja Majelis Pengawas.

Kode Etik Notaris Indonesia, Hasil Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, tanggal 30 Mei 2015, di Kota Tangerang.

### **D. INTERNET**

Wikipedia Pembatasan Sosial Bersekala Besar 2020  
“[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembatasan\\_sosial\\_bersekala\\_besar](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembatasan_sosial_bersekala_besar)”  
diakses 14 september 2020

Kementrian Koordinator idang Perekonomian Republik Indonesia “Penerapan PPKM untuk mengendalikan Laju Covid-19 dan Menjaga Kehidupan Masyarakat”<https://ekon.go.id/publikasi/detail/3159/penerapan-ppkm->

untuk-mengendalikan-laju-covid-19-dan-menjaga-kehidupan-masyarakat” di akses 15 september 2021

CNN Indonesia “ Alasan Penetapan PPKM Darurat 15 Daerah Luar Jawa Bali” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210709164347-20-665589/alasan-penetapan-ppkm-darurat-15-daerah-luar-jawa-bali>. diakses pada tanggal 15 September 2021

Kaltaraprov.go.id “sejarah Kalimantan utara” <https://kaltaraprov.go.id/profil/sejarah>. diakses tanggal 21 Juli 2021

Sistem I Provinsi “Provinsi Kalimantan Utara” <http://simtaru.kaltaraprov.go.id/web/profil/prof-kaltara>. diakses tanggal 21 Juli 2021

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur 2019, Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2018 <https://www.bps.go.id/indicator/12/141/2/kepadatan-penduduk-menurut-provinsi> di akses tanggal 21 Juli 2021

Detik. Com “Detik News” <https://news.detik.com/berita/d-3092196/jokowi-tetapkan-122-kabupaten-ini-daerah-tertinggal-2015-2019> di akses tanggal 21 Juli 2021